



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

LAPORAN MEI 2024

DEPUTI BIDANG
KERAWANAN PANGAN



badanpangannasional

Pangan Kuat Indonesia Berdaulat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bulan Mei Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan bulanan disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, Laporan Bulanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Bulanan ini berisi tentang laporan realisasi pencapaian output fisik dan realisasi penyerapan anggaran setiap akhir bulan berjalan dan disusun sebagai laporan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Jakarta, Juni 2025
Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Metodologi Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
2.1. Rencana Kinerja	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan	5
BAB IV PENUTUP.....	26
4.1. Kesimpulan.....	26
4.2. Permasalahan	26
4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi).....	27



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Mei sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Mei)	3
Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Mei 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Mei)	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025	9
Gambar 2. Rapat Pembahasan Masukan Tim PAK Penyusunan RPerpres Rencana Pangan Nasional.....	11
Gambar 3. Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan TA 2025.....	12
Gambar 4. Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Jepang	15
Gambar 5. Peninjauan Pelaksanaan Program Penyelamatan Pangan di Jawa Tengah	17
Gambar 6. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi.....	19
Gambar 7. Seminar Perspektif Lingkungan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	22
Gambar 8. Kalimantan Timur Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih, Dukung Ketahanan Pangan dari Desa	25



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49), Deputi Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi ; b. Pengendalian Kerawanan Pangan c. Pengadaan dan Pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana d. Pengawasan dan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi e. Pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan April Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi posisi bulan Mei tahun 2025. Laporan ini merupakan catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Mei Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan baik fisik maupun



keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan pada bulan Mei 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan, berdasarkan target pada bulan Mei 2025

1.3. Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian fisik dan keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.



BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

2.1. Rencana Kinerja

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Mei tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi pada bulan Mei tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Mei ditargetkan sebesar 7.50%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Mei sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Mei)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Mei Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14.536.538.000	Fisik	Keuangan (7.50%) Rp. 1.090.240.350	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA Koordinasi	- Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.114.864.000	1 Kegiatan	83.614.800	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179.647.000	4 NPSK	13.473.525	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	476.337.000	1 rekomendasi kebijakan	35.725.275	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	3.272.760.000	36.000 paket	245.457.000	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Mei Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14.536.538.000	Fisik	Keuangan (7.50%) Rp. 1.090.240.350	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	1.382.867.000	28.800 paket	103.715.025	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583.200.000	1.944 paket	43.740.000	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402.770.000	1 Data	30.207.750	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.559.056.000	1 Kegiatan	116.929.200	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000	5 rekomendasi kebijakan	68.571.150	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	1.004.850.000	1 Data	75.363.750	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000	1 Data	19.342.500	0
RAG- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	5 unit	254.100.375	0



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan terdapat di masing-masing eselon 2 yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melaksanakan 5 (lima) KRO yang terdiri dari 6 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.412.445.000,- dan Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki 5 output/RO dengan pagu anggaran pusat sebesar Rp. 7,124,093,000.- dan untuk mendukung capaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Realisasi keuangan pada bulan Mei Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi fisik dan keuangan per output.

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Mei 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi Mei)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (7.50%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp.1.090.240.350	Fisik	Keuangan Rp. 441.471.395	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA -Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	83.614.800	1 kegiatan	13.410.352	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	13.473.525	4 NSPK	56.438.947	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	35.725.275	1 rekomendasi kebijakan	25.402.037	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	245.457.000	36.000 paket	1.466.500	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (7.50%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp.1.090.240.350	Fisik	Keuangan Rp. 441.471.395	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	103.715.025	28.800 paket	22.010.228	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	43.740.000	1.944 paket	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	30.207.750	1 Data	35.390.183	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	116.929.200	1 Kegiatan	96.837.000	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	68.571.150	5 rekomendasi kebijakan	62.959.389	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	75.363.750	1 Data	6.922.890	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	19.342.500	1 Data	9.000.000	0
RAG- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	254.100.375	5 unit	111.633.869	0

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan hingga bulan Mei tahun 2025, anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan yang telah terserap tercatat sebesar **Rp. 441.471.395** atau **3.04%** dari total alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14.536.538.000,00.



Apabila dibandingkan dengan target realisasi bulan Mei sebesar Rp. 1.090.240.350,00 atau 7.50%, maka persentase capaian realisasi terhadap target tersebut adalah **40.49%**.

Realisasi ini didukung oleh kegiatan dari dua direktorat, yaitu: 1). Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar Rp. 154.118.247, 2). Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp. 287.353.148. Sehingga total realisasi bulan Mei 2025 mencapai **Rp. 441.475.395**.

Selama periode tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup koordinasi program, pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan pemantauan, serta kegiatan pendukung lainnya yang sesuai dengan rencana kerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan.

3.1.1. Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan; 2) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan; 3) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan; 4) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan(Bantuan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Bencana dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan) ; 5) Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 6) Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. dengan alokasi anggaran pusat sebesar Rp. 7.412.445.000 (Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Mei 2025:

1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025

Rapat dilaksanakan secara luring sebagaimana disposisi Bapak Sestama pada hari Jumat, 2 Mei 2025 di Ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien, bertujuan untuk menyamakan gerak langkah dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem agar tepat sasaran dan terintegrasi. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan SosialKemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) serta dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya atau yang mewakili dari BP Taskin, Kemendikdasmen, Kemendikti SainsTek, Kemenkes, Kemen ESDM, Bapanas,



BGN, dan KSP. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM menjelaskan terkait sebagai berikut :

- 1) Tujuan intervensi dalam Inpres 8/2025 adalah menurunkan beban pengeluaran (termasuk Bapanas), meningkatkan pendapatan, mengurangi kantor kemiskinan;
- 2) Amanat Inpres 8/2025 ditujukan kepada 34 Menteri, 11 Kepala Lembaga dan seluruh Gubernur, Bupati/Walikota;
- 3) Inpres 8/2025 berlaku 27 Maret 2025 - 31 Desember 2029 di mana pelaksanaannya harus didasarkan DTSEN dan dilaporkan setiap satu kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 4) Angka kemiskinan ekstrem (USD1,9 PPP) per September 2024 1,13% (3,17 juta jiwa) dan ditargetkan menjadi nol persen pada tahun 2026 melalui intervensi program dan kegiatan dari kementerian/lembaga; dan
- 5) Rumah tangga miskin ekstrem didominasi oleh kepala Rata tidak tamat SD/tidak berpendidikan (74,51%), pekerja sektor informal (59,54%), pekerja sektor pertanian (46,26%), berusia 30-49 tahun (40,66%), dan lansia (25,18%).

Perwakilan Badan Pangan melalui :

- 1) Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan menyampaikan bahwa penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan, Bapanas telah berkoordinasi dengan Bappenas terkait penggunaan data Regsosek yang menjadi bagian DTSEN. Penyaluran bantuan pangan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 dengan paralel mengkoordinasikan update DTSEN.
- 2) Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan intervensi mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan Direktorat PKP Bapanas pada TA 2025, yaitu (i) Bantuan Pangan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan yang menyasar desil 1 miskin ekstrem yang mengalami kerawanan pangan diindikasikan oleh Prevalence of
- 3) Undernourishment (PoU) tinggi dan (ii) Bantuan Pangan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan yang menyasar desil 1 miskin ekstrem di wilayah rentan rawan pangan dengan indek risiko bencana yang tinggi. Selain kegiatan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, Bapanas juga melaksanakan kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi amanat RPJMN 2025-2029 dalam bentuk pemberian bantuan beras fortifikasi kepada Keluarga Risiko



Stunting (KRS). Memperhatikan seluruh intervensi program harus menggunakan DTSEN, maka diperlukan informasi posisi KRS dalam DTSEN.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025

2. Rapat Pembahasan Masukan Tim PAK Penyusunan RPerpres Rencana Pangan Nasional.

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di R. Rapat Biro PKH, bertujuan untuk menindaklanjuti masukan dari K/L Tim PAK Penyusunan RPerpres Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Pertemuan dibuka oleh Kepala Biro PKH dan dihadiri oleh Kepala Biro OSH dan perwakilan dari Direktorat Lingkup NFA. Kepala Biro PKH menyampaikan bahwa berdasarkan surat permintaan masukan akan RPerpres Rencana Pangan, baru empat instansi yang telah memberi masukan: Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan; Asdep Cadangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan; Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan; dan Biro Hukum Kemenko Pangan. Sementara itu, Kepala Biro OSH menyampaikan terkait urgensi kelembagaan pangan dan pentingnya menyelesaikan RPerpres sesuai target, yaitu tahun 2025.

Pembahasan masukan-masukan dari K/L dalam batang tubuh antara lain:

- penambahan dinamika global.
- penambahan definisi “Pangan Lokal”.
- penambahan klausul terkait Program Strategis Nasional yang tercantum pada PerPres No. 12 tahun 2025 di bidang Pangan (MBG, Pengembangan Lumbung Pangan/Food Estate, Pengembangan Pangan melalui Perhutanan berbasis masyarakat, dll) agar dicantumkan di pasal 3 ayat (2).
- penambahan ayat baru yang mencantumkan poin terkait antisipasi



ketidakpastian global pada komoditas pangan.

- pencantuman 16 indikator kinerja dengan memberi angka-angka target hingga lima tahun (2025-2029) untuk menjadi rujukan pembentukan Rencana Pangan Daerah.
- penambahan peran dan fungsi koordinatif Menko Pangan/Kemenko Pangan, saat ini peran Menko baru disebut secara umum di Pasal 1 (hanya menyebutkan fungsi Menko Pangan secara umum) dan Pasal 6 (menyebutkan peran Kemenko Pangan dalam pemantauan dan evaluasi), fungsi koordinasi, sinkronisasi dan debottlenecking dalam pelaksanaan RPN belum dituangkan secara jelas di dalam batang tubuh RPerpres.
- aspek pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang diamanatkan dalam RPerpres menjadi perhatian khusus.
- perlu ada pasal tambahan yang mengamanatkan tentang integrasi satu data pangan nasional.

Pembahasan lampiran RPerpres antara lain:

- penyesuaian data target kinerja sesuai dengan target di RPJMN.
- perlunya validasi indikator kinerja yang tidak ada di RPJMN.
- penambahan target kinerja status gizi.



Gambar 2. Rapat Pembahasan Masukan Tim PAK Penyusunan RPerpres Rencana Pangan Nasional

3. Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan TA 2025

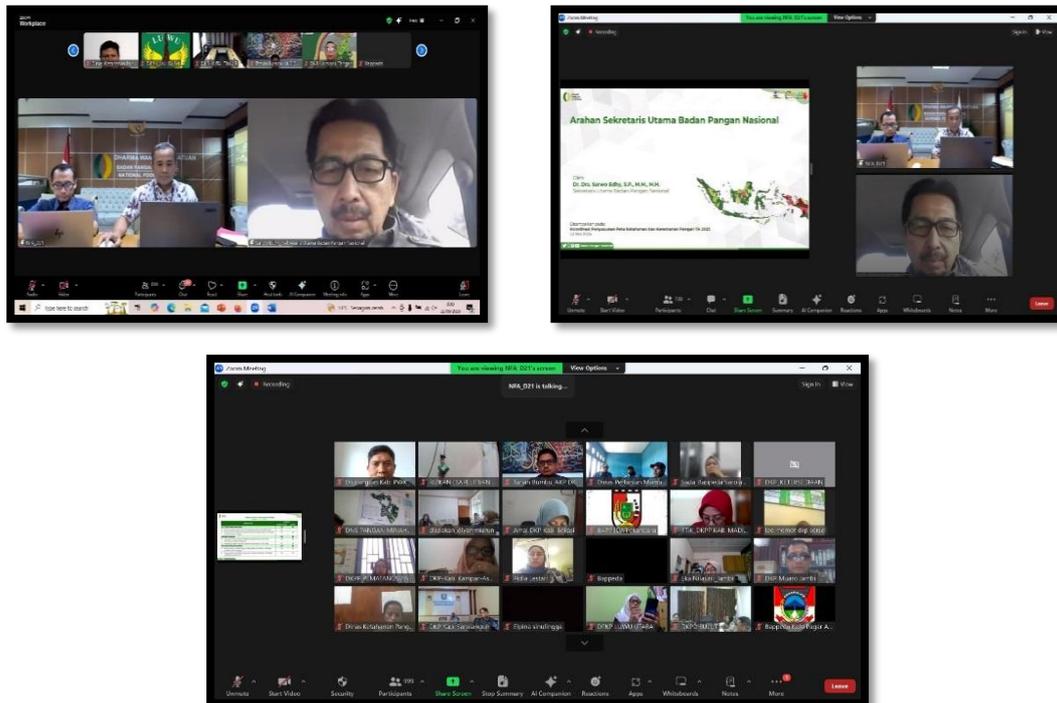
Pertemuan dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 22 Mei 2025, bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) TA. 2025; dan mensosialisasikan target kinerja pembangunan pangan tahun 2025-2029 khususnya terkait Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Pertemuan koordinasi dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dengan narasumber Direktur SUPD 1 Kemendagri dan Dr. Farit M. Affendi (Tim Pakar FSVA), serta dihadiri oleh perwakilan Bappeda dan OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam arahnya, Sestama menyampaikan bahwa IKP Nasional dan penurunan persentase daerah rentan rawan pangan telah menjadi target RPJMN 2025-2029. Sejalan dengan hal tersebut, didaerah FSVA juga digunakan sebagai Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Pangan Daerah. Oleh karena itu, Pemda perlu memperhatikan terkait validitas data yang digunakan, keterlibatan lintas sektor, persetujuan pimpinan daerah, optimalisasi sumber dana, perlunya dukungan APBD, serta intervensi program ketahanan pangan dan gizi berdasarkan FSVA. Sementara itu, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan urgensi penyusunan FSVA, penyusunan FSVA dan IKP Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 menggunakan metode lama dan metode baru (definisi, sumber data, dan metodologi analisis), serta dukungan pusat dalam penyusunan FSVA.



Direktur SUPD 1 Kemendagri menyampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan ketahanan pangan termasuk penanganan kerawanan pangan harus didukung dengan kebijakan sesuai kewenangan daerah dengan memanfaatkan hasil analisis dan Peta FSVA. Selain itu perlu mengoptimalkan sinergi dan koordinasi OPD Pangan dan OPD lain untuk pencapaian target ketahanan pangan di daerah.



Gambar 3. Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan TA 2025

4. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Jepang

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Jepang merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan sejalan dengan kemitraan strategis Indonesia-Jepang yang mempunyai kesamaan tipologi wilayah kepulauan dan sebagai negara agraris dengan tantangan dalam regenerasi petani, maka dilakukan pendalaman langsung terhadap kebijakan pembangunan Jepang di bidang Pertanian dan Pangan, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk: (1) Mendalami secara langsung implementasi kebijakan pembangunan Jepang di bidang Pertanian dan Pangan, Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan, melalui teknologi smart farming dan urban farming dan manajemen pasar pangan; serta sistem penangkapan ikan berkelanjutan,



pengawasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), budidaya perairan modern dan manajemen pasar ikan; dan (2) Mendalami implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara Pemerintah Indonesia dan Jepang yang disepakati pada akhir tahun 2024 untuk penguatan kerja sama perdagangan kredit karbon berbasis pengelolaan hutan berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati di tengah ancaman perubahan iklim; dan program di bidang kehutanan, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan hutan berkelanjutan.

Delegasi Komisi IV DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Jepang didampingi oleh perwakilan dari mitra kerja Komisi IV DPR RI, yaitu Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, PT Perikanan Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan KBRI Tokyo. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Jepang dilaksanakan pada tanggal 22–26 Mei 2025 berlokasi di Kota Tokyo, Jepang.

Pendampingan Badan Pangan Nasional dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Jepang dimaksudkan dan bertujuan guna memperoleh pembelajaran atas:

1. Regulasi tentang Pangan, Pertanian dan Daerah Pedesaan. Saat ini Parlemen Jepang Tengah melakukan pembahasan revisi Food Law dengan pergeseran fokus dari produksi menjadi ketahanan pangan secara komprehensif, sehingga relevan dengan pembahasan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pangan dari Komisi IV DPR RI yang tengah berlangsung di Indonesia;
2. Tatakelola ketersediaan pangan, yang meliputi konsep ketahanan pangan, upaya pencapaiannya di tengah tantangan global, dan isu terkait (keamanan pangan dan ketersediaan pangan). Khusus untuk beras sebagai makanan utama penduduk Jepang dan juga Indonesia; di mana telah terjadi kenaikan harga beras di Jepang serta bahan pangan lain, yaitu pangan asal tumbuhan, asal hewan, dan asal ikan yang dihasilkan oleh petani dan nelayan yang rata-rata berumur 68 tahun di Jepang;
3. Pengendalian kerawanan pangan, khususnya dalam penanganan pangan ketika terjadi gangguan produksi atau penurunan pasokan pasokan yang disebabkan oleh kebencanaan alam, konflik, serta serangan hama dan penyakit;
4. Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan guna meningkatkan



kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat melalui pola pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (Shokuiku) yang ditempuh melalui edukasi dalam keluarga dan pendidikan formal di sekolah.

Kegiatan Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Jepang diawali dengan (1) Pertemuan dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, dilanjutkan dengan (2) Pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, (3) Pertemuan dengan Komisi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Parlemen Jepang, (4) Studi Lapangan ke The University of Tokyo Chiba Forest, (5) Kunjungan/Studi Lapangan ke Ota Market (Pasar Lelang Sayur dan Buah), (6) Kunjungan/Studi Lapangan ke Toyosu Fish Market, dan diakhiri dengan (7) Pertemuan dengan Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Jepang dan Federasi Mikronesia di KBRI Tokyo.

Berdasarkan pokok-pokok diskusi dengan Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF), Ministry of Environment (ME), Parlemen, dan University of Tokyo Chiba Forest (UTCF) serta kunjungan di Pasar Ota dan Pasar Ikan Toyosu disimpulkan bahwa terdapat relevansi pendalaman kebijakan pangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jepang Pemerintah Indonesia mengingat kesamaan dalam hal:

1. Tengah berlangsung revisi Undang-Undang Pangan;
2. Karakteristik sebagai negara kepulauan dan agraris yang didominasi petani tua serta kesulitan regenerasi sumberdaya manusia di sektor pertanian;
3. Keberadaan kawasan hutan sebagai wilayah tutupan yang berisiko mengalami kebakaran dan serangan binatang liar yang pengelolaannya telah melibatkan perguruan tinggi;
4. Implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) melalui proyek Joint Crediting Mechanisms (JCM) untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
5. Implementasi Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dengan tujuan untuk pembangunan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 4. Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Jepang

3.1.2. Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan

Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 7.124.093.000. (Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Mei 2025:

1. NFA Fasilitasi Mobil Untuk Distribusi Pangan Berlebih

Penyelamatan pangan menjadi gerakan penting untuk mengurangi limbah makanan yang masih layak konsumsi, agar bisa didistribusikan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Untuk itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memfasilitasi daerah berupa mobil penyelamatan pangan untuk distribusi pangan berlebih ke masyarakat. “Sejak tahun 2022, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah menginisiasi Gerakan Selamatkan



Pangan (GSP) sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan mengurangi sisa pangan,” ujar Plt Sekretaris Utama, Sarwo Edhy.

Saat meninjau pelaksanaan program penyelamatan pangan di Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025). Sarwo menjelaskan, upaya ini tidak bisa dilakukan oleh NFA saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas sektor. “Kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, komunitas penyelamat pangan, dan pihak swasta sebagai donatur,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa fasilitasi kendaraan operasional penyelamatan pangan ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses redistribusi pangan berlebih. “RPJMN 2025–2029 telah menetapkan target pengurangan sisa pangan sebesar 3–5% setiap tahun dari pelaku usaha dan konsumen. NFA sebagai instansi pengampu memiliki tanggung jawab untuk mencapainya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholder seperti hotel, restoran, industri pangan, ritel, hingga bank pangan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penyelamatan pangan.

Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, menambahkan bahwa pelaporan aktivitas penyelamatan pangan juga menjadi hal penting. “Untuk tahun 2025 ini, terdapat 5 unit kendaraan operasional penyelamatan pangan yang akan diberikan kepada daerah. Provinsi penerima masih dalam tahap verifikasi. Daerah yang mendapatkan fasilitas kendaraan wajib memanfaatkan dengan optimal dan melaporkan aktivitasnya secara rutin melalui platform sbp.badanpangan.go.id agar capaian penyelamatan dapat terpantau,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, menyampaikan apresiasinya atas dukungan kendaraan operasional ini. “Kendaraan ini sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan penyelamatan pangan di Jawa Tengah. Ke depan, kami akan dorong adanya Instruksi Gubernur agar gerakan ini semakin masif,” katanya. Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam pertemuannya dengan Menteri.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF) pada 29 April 2025 lalu juga menyampaikan bahwa Indonesia serius dalam menangani isu sisa pangan. “Inisiatif bersama dengan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengalaman saya di sektor ritel modern membuktikan bahwa pangan berlebih



bisa dialihkan untuk membantu masyarakat rentan seperti lansia dan tunawisma,” ujar Arief. Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk lebih bijak dalam mengelola pangan. “Mari kita hentikan pemborosan pangan demi ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tambahnya. Dalam kunjungan di Semarang tersebut, Plt Deputi Bidang Kerawanan Pangan juga menyerahkan donasi pangan di UPTD Among Jiwo dan Panti Wredha Harapan Ibu. Donasi ini merupakan hasil kerja sama antara Food Bank of Indonesia (FOI) Semarang, Svarna Loka, dan para mitra swasta yang menyumbangkan pangan berlebih. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Endang Sarwiningsih Setyawulan, Kepala UPTD Among Jiwo Ambarsari, Ketua FOI Semarang, Ketua Svarna Loka, dan Pembina Panti Wredha Harapan Ibu.



Gambar 5. Peninjauan Pelaksanaan Program Penyelamatan Pangan di Jawa Tengah

2. Stabilitas Pangan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan nasional. Menyadari peran strategis sektor pangan dalam menjaga stabilitas tersebut, pemerintah terus memperkuat kebijakan dan langkah konkret di bidang pangan.

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari peningkatan produksi, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), hingga penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Langkah ini membuahkan hasil, tercermin dalam inflasi



pangan yang tetap terkendali. Pada April 2025, inflasi tercatat hanya 1,17% (yoy), dengan kontribusi komponen pangan sebesar 0,64%.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebagai institusi yang mengorkestrasi kebijakan pangan nasional, telah menggulirkan sejumlah program pengendalian inflasi pangan sepanjang tahun 2025. Di antaranya pemantauan harga oleh 1.053 enumerator, pelaksanaan 3.393

kali Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan sebesar 110.725 ton, pembangunan 543 Kios Pangan, serta penyaluran beras dan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak masing-masing 181.173 ton dan 34.941 ton.

“Cadangan Jagung Pemerintah ini diberikan kepada peternak layer dan atau broiler mandiri-UMKM saat terjadi gejolak pasokan dan harga,” jelas Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (26/5/2025).

Selain itu, NFA juga mendorong penguatan ketahanan pangan di daerah melalui peningkatan produksi pangan lokal, pemantauan harga, pelaksanaan GPM, kerja sama antar daerah (KAD), penguatan CPP Daerah (CPPD), dan pembangunan Koperasi Merah Putih.

Dalam menghadapi tantangan pasca panen raya dan menjaga stabilitas harga beras, khususnya di Indonesia timur, NFA bersama Kemenko Pangan dan kementerian/lembaga terkait telah melakukan rapat koordinasi penyaluran beras SPHP. Rapat ini membahas antara lain evaluasi penyerapan gabah/beras oleh Perum Bulog, proyeksi harga beras premium dan medium, serta distribusi stok SPHP.

“Terdapat highlight dari hasil rapat koordinasi SPHP beras tersebut, yang pertama kaitannya dengan HPP kembali dilengkapi dengan syarat kualitas setelah Inpres 6/2025 selesai masa berlakunya, hal ini untuk mengurangi penurunan kualitas beras. Dan juga sedang dibahas kaitannya dengan penyesuaian HET beras sesuai dengan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Nita.



Dalam forum yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

“Capaian sasaran pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi sasaran pembangunan yang lain, karena itu kita juga ingin bahwa pengendalian inflasi sekaligus juga kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan merupakan bentuk kontribusi nyata sektor pangan terhadap pertumbuhan ekonomi. "Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan tidak hanya soal menjaga daya beli masyarakat, tapi juga mendukung iklim usaha yang sehat, menstimulus produktivitas petani dan peternak, serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Arief. Dalam konteks ini, NFA turut menginisiasi kerja sama antara peternak mandiri dan program Dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) untuk mendorong harga livebird dan telur ayam ras yang masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Saat ini, harga livebird tercatat 21,19% di bawah HAP (Rp19.072/kg), sementara harga telur ayam ras 8,33% di bawah HAP (Rp24.293/kg).

“Untuk itu telah disalurkan 230 kg daging ayam ras dari peternak tahap kesatu yang tergabung dalam Pinsar Indonesia untuk mendukung dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) di Kabupaten Tangerang dan Serang (4 unit) pada 21 Mei 2025 yang sejalan dengan pelaksanaan SPHP livebird di tingkat produsen,” ujar Nita.



Gambar 6. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi



3. Program MBG : Sinergi Gizi, Edukasi, dan Lingkungan Menuju Indonesia Emas Tahun 2025

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari strategi nasional mewujudkan generasi sehat 2045. Program prioritas Presiden Prabowo ini ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada tahun 2026, sehingga membutuhkan desain yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi sirkular.

Dalam seminar bertajuk “Perspektif Lingkungan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang digelar di Jakarta, Selasa (27/5/2025), Plt Sekretaris Utama, Sarwo Edhy, menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya dilihat dari aspek gizi dan pendidikan, tetapi juga kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan.

“MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, tapi juga investasi masa depan. Kita ingin membentuk generasi sehat yang sekaligus sadar lingkungan,” ujar Sarwo.

Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo, menambahkan bahwa MBG adalah sarana penting untuk edukasi anak-anak mengenai konsumsi pangan yang bertanggung jawab. “Melalui MBG, kita dapat menanamkan nilai-nilai keberlanjutan sejak dini, termasuk menghargai makanan dan mengurangi sisa pangan,” ujarnya.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2024 menunjukkan potensi food waste di sekolah mencapai 1,1–1,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 451–603 ribu ton merupakan makanan berlebih yang masih dapat diselamatkan dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua JP2GI (Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia), Soen’an Hadi Poernomo, mengingatkan bahwa MBG juga berperan sebagai model kebijakan pangan berkelanjutan.

“Program ini harus menjadi contoh bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bisa dilakukan tanpa merusak ekosistem. MBG adalah bagian dari solusi menghadapi krisis pangan dan iklim global,” tegasnya.



Seminar ini juga menyoroti tantangan besar Indonesia terkait sampah makanan. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, sebanyak 23 hingga 48 juta ton sampah makanan dihasilkan setiap tahun, berdampak signifikan pada ekonomi dan lingkungan. Para narasumber mendorong pendekatan ekonomi sirkular serta pemanfaatan pangan lokal untuk mengurangi jejak karbon.

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah menetapkan target penyelamatan pangan sebesar 3–5% per tahun melalui Perpres No. 12 Tahun 2025. MBG diharapkan menjadi bagian integral dari upaya tersebut melalui strategi seperti edukasi gizi di sekolah, penguatan distribusi pangan, dan optimalisasi pemanfaatan sisa pangan.

Direktur Kewaspadaan Pangan, Nita Yulianis, mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir terhadap sisa makanan. “Sisa pangan yang layak konsumsi bukanlah sampah. Ini bisa dimanfaatkan kembali, dan yang tidak layak konsumsi bisa diolah menjadi kompos, pakan maggot, atau bahkan energi. Ini langkah konkret mengurangi beban TPA,” jelas Nita.

Sementara itu, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Rinna Syawal, menyoroti pola konsumsi generasi muda yang lebih tertarik pada makanan cepat saji.

“Data menunjukkan hanya 2,3–2,5% remaja usia 10–19 tahun yang mengonsumsi sayur dan buah lebih dari 5 porsi per hari. Generasi Z dan Alpha cenderung memilih makanan cepat saji tinggi kalori dan rendah serat,” paparnya.

Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA. Program MBG menjadi instrument yang baik untuk membiasakan generasi muda mengonsumsi pangan B2SA untuk tumbuh sehat, aktif, dan produktif.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa keberhasilan program MBG akan menjadi tonggak penting bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dengan akses gizi yang cukup, sekaligus punya kesadaran kolektif terhadap kelestarian lingkungan. MBG harus menjadi contoh praktik pangan berkelanjutan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga mencerdaskan dan menjaga bumi,” ujar Arief.



Seminar ini menjadi wadah sinergi multi-pihak untuk mendiskusikan strategi integratif antara peningkatan gizi, edukasi anak, dan pelestarian lingkungan, dalam satu program nasional yang berdampak luas.



Gambar 7. Seminar Perspektif Lingkungan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

4. Kalimantan Timur Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih, Dukung Ketahanan Pangan dari Desa

Pemerintah terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setelah Kalimantan Tengah, menyusul Kalimantan Timur menunjukkan keseriusannya. Melalui peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) yang digelar di Samarinda, Sabtu (24/5/2025), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target ambisius: 100 persen desa/kelurahan menyelesaikan Musdessus sebelum akhir Mei 2025.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebagai bagian dari Satuan Tugas Nasional menegaskan kembali bahwa koperasi bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan instrumen untuk memperkuat sistem pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi luar desa.

Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, menilai kehadiran koperasi desa akan meningkatkan efisiensi pasok pangan dari hulu ke hilir. “Dengan



model koperasi, distribusi pangan bisa lebih terintegrasi, margin petani lebih baik, dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen lebih terjamin,” jelas Nita.

Ia juga menambahkan, NFA mendorong integrasi antara koperasi dengan program strategis seperti penyediaan pangan murah, penyerapan hasil tani, pengelolaan cadangan pangan masyarakat, hingga distribusi pangan bergizi ke daerah rentan rawan pangan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, yang memimpin peluncuran ini, menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis nasional yang akan menjadi tulang punggung ekonomi desa dan pengungkit ketahanan pangan.

“Dengan koperasi, kita ingin memotong rantai distribusi yang selama ini panjang dan mahal. Koperasi Merah Putih akan menjadi simpul baru distribusi pangan dan sarana produksi rakyat,” ujarnya.

Per 23 Mei 2025, dari total desa dan kelurahan di Kalimantan Timur, tercatat 93,4 persen telah tersosialisasi, 33,1 persen telah menyelenggarakan Musdessus, 19,9 persen tengah dalam proses akta notaris, dan 0,6 persen telah resmi berbadan hukum.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji dalam paparannya menyampaikan bahwa seluruh perangkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran dan mengerahkan camat sebagai koordinator Musdessus serentak. Meski terdapat tantangan seperti infrastruktur dan keterbatasan tenaga pendamping, komitmen kuat tetap ditegaskan.

“Pemerintah daerah bersama stakeholder desa terus bergerak. Kami upayakan seluruh proses pembentukan koperasi ini tuntas sesuai jadwal,” ujar Seno.

Berdasarkan data nasional, hingga 23 Mei 2025, sebanyak 77.788 desa/kelurahan telah tersosialisasi program koperasi Merah Putih, setara dengan 92,96 persen dari total wilayah administratif Indonesia. Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan laju pembentukan koperasi tercepat di luar Pulau Jawa.

Koperasi Merah Putih sendiri dibentuk sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 unit koperasi aktif. Koperasi ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat desa, seperti



sulitnya akses pangan terjangkau, minimnya lapangan kerja, serta ketergantungan terhadap tengkulak dan pinjaman berbunga tinggi.

Melalui koperasi, masyarakat desa akan memiliki akses terhadap unit usaha strategis, mulai dari penyediaan sembako, pupuk, BBM, hingga layanan distribusi hasil panen. Sebagian koperasi juga diarahkan mengelola layanan kesehatan dasar dan penyaluran bantuan pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan terpisah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kedaulatan pangan dari desa. “Koperasi Merah Putih adalah bentuk nyata dari reformasi sistem pangan nasional. Dengan memperkuat peran desa sebagai produsen sekaligus pengelola distribusi pangan, kita mendorong pemerataan akses pangan yang terjangkau, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Arief.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Kalimantan Timur mempercepat pembentukan koperasi menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan keberpihakan terhadap petani dan pelaku usaha pangan di tingkat desa masih sangat kuat. “Kami di Badan Pangan Nasional akan terus mendukung dengan data, fasilitasi kelembagaan, serta integrasi program agar koperasi benar-benar menjadi simpul kekuatan kemandirian pangan di tingkat desa,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan peluncuran di Kalimantan Timur ditutup dengan kunjungan lapangan ke desa-desa model pelaksanaan Musdessus dan koperasi percontohan. Peluncuran nasional program ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025, menandai dimulainya era baru koperasi berbasis desa sebagai poros pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan Indonesia dari akar rumput.



Gambar 8. Kalimantan Timur Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih, Dukung Ketahanan Pangan dari Desa



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan bulan 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 1(satu) kegiatan terdiri dari 5 KRO dan 6 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14,536,538,000 untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 14.536.538.000 dengan target penyerapan bulan Mei sebesar Rp. 1.090.240.350 (7.50%). Realisasi keuangan bulan Mei tercatat sebesar Rp. 441.471.395 atau setara dengan **3.04%** dari total pagu tahunan, dan **40.49%** terhadap target bulanan. Realisasi ini berasal dari dua direktorat, yaitu: Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar Rp. 154.118.247 dan Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp. 287.353.148.
3. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan telah mencakup koordinasi program, pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan pemantauan, serta kegiatan pendukung lainnya sesuai rencana kerja. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pencapaian target bulanan sudah mengalami perbaikan dari bulan sebelumnya walaupun belum mencapai 100% dari target bulanan yaitu Rp1.090.240.350 atau 7.50%.

4.2. Permasalahan

1. **Belum tercapainya target realisasi anggaran pada bulan Mei 2025**
Realisasi anggaran sebesar **3.04%** dari total pagu tahunan dan **40.49%** dari target bulanan menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran pada periode pelaporan. Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan di bulan-bulan berikutnya.



2. **Potensi keterlambatan pencapaian target tahunan** Jika laju serapan anggaran tidak segera ditingkatkan, maka ada risiko tidak tercapainya target tahunan, yang dapat berdampak pada efektivitas program dan evaluasi kinerja unit kerja.

4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)

1. **Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas** Mendorong percepatan realisasi kegiatan di masing-masing direktorat untuk memastikan kegiatan yang belum berjalan segera dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. **Monitoring dan Evaluasi Berkala** Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap progres kegiatan dan anggaran, baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis, serta melaporkannya dalam forum internal secara periodik.